ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI JAWA TIMUR (STUDI KASUSU 38 KAB/KOTA DI JAWA TIMUR)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

MUHAMMAD NOOR SANDI HIDAYAT
115020107111051

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISI DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI JAWA TIMUR (STUDI KASUSU 38 KAB/KOTA DI JAWA TIMUR)

Yang disusun oleh :

Nama	:	Muhammad Noor Sandi Hidayat
NIM	:	115020107111051
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Desember 2015

Malang,18 Januari 2016

Dosen Pembimbing,

Dr.Moh Khusaini, SE.,M.Si.,MA

NIP. 19710111 199802 1001

ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI JAWA TIMUR (STUDI KASUS 38 KAB/KOTA DI JAWA TIMUR)

Muhammad Noor Sandi Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : sandi.hidayat27@gmail.com

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal den pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah topik yang masih hangat diperbincangkan sampai saat ini oleh pakar ekonomi. Dan juga masih banyak penelitian yang terus diuji dengan berbagai macam studi kasus dengan tujuan mengetahui hasil yang mutlak dari hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah melalui efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada periode tahun 2009-2013, apakah selama tahun tersebut desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. dalam upaya mencapai tujuan digunakan regresi data panel dengan menganalisa 38 kab/kota di Jawa Timur selama periode 2009-2013. Penulis mendapatkan hasil bahwa penerimaan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya PAD maka mengindikasikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena semakin meningkatnya penerimaan daerah yang menyebabkan meningkatnya nilai tambah atas produksi pada daerah tersebut.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Penerimaan daerah, Pengeluaran Daerah

---

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara dengan ribuan pulau, adanya perbedaan karakteristik pada setiap daerah merupakan konsekuwensi logis yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Perbedaan yang ada pada setiap wilayah mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga menyebabkan pola pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi tidak seragam. Perbedaan yang ada pada setiap daerah membuat perbedaan untuk tumbuh menjadi tidak sama, di beberapa daerah dapat tumbuh dengan cepat sementara di daerah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini membuat pada akhirnya terjadi ketimpangan baik pembangunan maupun keuangan daerah.

Dengan dibuatnya UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah, Indonesia telah melakukan transformasi tata pemerintahan dari sentralisasi menuju desentaralisasi. Dengan telah ditetapkannya tersebut maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah tingkat II, dan juga akan tercipta peningkatan kemampuan setiap daerah untuk lebih mandiri. Maka dari itu otonomi daerah diharapkan bisa menjadi sebuah formula terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui kebijakan desentralisasi.

Desentralisasi yang demokratis di Indonesia berdampak pada perubahan baru dalam pengaturan pemerintah lokal, tetapi masih tetap berhadapan dengan struktur lama yang menghambat desentralisasi dan demokrasi. Sampai dengan saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan isu yang menarik untuk didiskusikan, hal ini terkait dengan fakta bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi bahasan di ranah ekonomi, tetapi juga mencangkup bahasan lain seperti politik, administratif, dan geografis. Salah satu hal yang paling menarik dalam desentralisasi ini adalah apakah desentralisasi fiskal berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi? Dari banyak studi yang telah dilakukan masih terdapat ambiguitas antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan sektoran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB atas dasar harga konstan 2000 yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Di provinsi Jawa Timur PDRB kabupaten/kota masih mengalami kesenjangan antara kota satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan masih terpusatnya kegiatan perekonomian di Jawa Timur.Robinson Tarigan (2005), menyatakan bahwa pertubuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut,yaitu kenaikan seluruh nilai tambah *(add value*), yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai rill (dinyatakan dalam harga konstan).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Sejak tahun 2001, pemerintah telah menerapkan UU No.25 Tahun 1999 yang kini telah di revisi kembali menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Maka dari itu dengan diberlakukannya undang-undang tersebut Indonesia memasuki era baru dalam desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dari desentralisasi. Yang artinya, berbicara tentang desentralisasi tidak luput dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diukur dari kemampuan menggali dan mengatur keuangannya. Menurut Sidik (2000), tujuan umun desentralisasi fiskal harus dapat menjamin :

1. Kesinambungan kebijakan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro.
2. Mengadakan koreksi atas ketimpangan antardaerah (*horizontal imbalance*) dan ketimpangan antar pusat dan daerah (*vertical imbalance*) untuk meningkatkan efesiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun pemerintah daerah.
3. Dapat memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobiltasi pendapatan secara regional ataupun nasional.
4. Meningkatkan akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
5. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan yang berkualitas di setiap daerah.
6. Menciptakan kesejahteraan social (*social welfare*) bagi masyarakat.

Implementasi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk menggali dan mengelola sumber keuangannya sendiri, sehingga berdampak pada munculnya berbagai macam kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan keuangan daerah. Namun pada titik ini tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Indikator Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diukur dengan mengacu pada indikator yang diharapkan mampu menggambarkan desentralisasi fiskal di wilayah tersebut. Indikator yang menjadi sebuah acuan sebagai pengukur adalah rasio penerimaan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan rasio pengeluaran daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Indikator ini merupakan indikator yang digunakan peneliti sebelumnya seperti Khusaini (2006), dan lainnya. Dari variable yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu dan dasar teoritis maka penulis menyimpulkan bahwa indikator desentralisasi fiskal dapat dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Menurut Samuelson (2004), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang investasi dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah untuk mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktifitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No.13 tahun 2003 Bab I pasal I ayat 2 disebutkan bahwa tenga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Jadi yang dimaksud tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan atau batasan usia yang telah di tentukan.Untuk menghitung kontribusi tenaga kerja terhadap laju pertumbuhan ekonomi digunakan indikator TPAK. TPAK merupakan

indikator yang menggambarkan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Pertumbuhan Ekonomi

Robinson tarigan (2004), menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). Ada tiga faktor atau komponen utama dalam sebuah pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa (Todaro,2011). Ketiga komponen tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia
2. Pertumbuhan penduduk, yang akan meningkatkan jmlah angkatan kerja
3. Kemajuan teknologi, yang akan meningkatkan aplikasi pengetahuan ilmiah baru dalam bentuk temuan dan inovasi berkenaan dengan modal fisik dan modal manusia.

Todaro dan smith (2011) menjelaskan beberapa pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, yaitu: teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan, model pertumbuhan struktural, revolusi ketergantungan internasional.

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas negara kepada daerah otonom. Sampai pada saat ini dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi masih menjadi topic perdebatan dalam berbagai literature pembangunan. Hal ini juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah. Diharapkan desentralisasi fiskal dapat berdampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi, penyerapan tenaga kerja.

Menurut Pose et all dalam Siagian (2010), terdapat banyak literature yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keuntungan ekonomi. Sondhi (2005), menyatakan bahwa pemberlakuan desentralisasi di Indonesia merupakan salah satu pemindahan sumber keuangan yang terbesar kepada pemerintah daerah, hai ini adalah hal penting untuk memastikan bahwa anggaran ini dikelola secara efektif sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang akan memaparkan tetang indikator untuk mengukur bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal yang di terapkan di Indonesia khususnya propinsi Jawa Timur, antara lain, desentralisasi penerimaan, investasi,

desentralisasi pengeluaran serta tenaga kerja terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan objek desentralisasi fiskal di Jawa Timur dengan data yang digunakan adalah data PDRB, Investasi, angkatan kerja 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang di ambil dari database BPS propinsi Jawa Timur serta literatur lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder menurut runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) atau yang disebut dengan data panel. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau dokumentasi lembaga. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data dokumentasi Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur.

Metode data panel digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini. Data panel merupakan gabungan antara data time series dengan data cross section. Keunggulan data panel ialah data panel mampu mengontrol heterogenitas individual, dimana data panel mampu mengontrol varian tempat dan waktu, sedangkan data runtun waktu dan belah silang tidak mampu. Selain itu, data panel lebih banyak memberikan informasi, variabilitas, derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan mengurangi kolinieritas antar variabel. Beberapa *software* komputer seperti Microsoft Excel, Eviews atau SPSS digunakan untuk menganalisa data.

Model Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan pengunaan data panel. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika. Menurut Samuelson dalam Damodar Gujarati ekonometrika didefenisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi yang sebenarnya (aktual) yang didasarkan pada pengembangan yang bersamaan dari teori dan pengamatan, dihubungkan dengan metode inferensi yang sesuai. Ekonometrika merupakan campuran dari teori ekonomi, ekonomi matematis, statistika ekonomi, dan statistika matematis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode tahun 2009 hingga tahun 2013 berdasarkan hasil penelitian sebesar 6,7%. Tren pertumbuhan ekonomi di 38 Kabupaten/Kota meningkat selama periode 2009 hingga tahun 2012, namun pada tahun 2013 sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang stabil antara lain Kabupaten Lumajang dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,06% setiap tahunnya, Kabupaten Situbondo dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,18% setiap tahunnya, Kabupaten Probolinggo dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,26% setiap tahunnya, Kabupaten Nganjuk dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,4% setiap tahunnya, Kabupaten Magetan dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,06% setiap tahunnya, Kota Probolinggo dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,44% setiap tahunnya, Kota Pasuruan dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,06% setiap tahunnya, dan Kota Madiun dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,28% setiap tahunnya.

Tabel 1 : Pdrb Jawa Timur Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun	Harga Belaku	Harga Konstan 2000	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	686.847,56	320.861,17	5,01
2010	778.564,24	342.280,76	6,68
2011	884.502,65	366.983,28	7,22
2012	1.001.720,88	393.666,44	7,27
2013	1.136.326,87	419.428,45	6,54
Rata-rata Pertumbuhan periode tahun 2009-2013			**6,54**

Sumber : BPS Jatim 2015

Tabel 1 di atas merupakan PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Jawa Timur ternyata dapat memberikan efek peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang baik. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,54% di periode tahun 2009 sampai dengan 2013.

Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Jawa Timur

Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, salah satu bentuk dukungan pendanaan kepada daerah dilakukan dengan cara pemberian sumber perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh daerah. Karena sumbet tersebut sangat terbatas, maka daerah diberikan dukungan pendanaan melalui transfer dari pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus dan penyesuaian. Selain sumber penerimaan dari daerah sendiri dan transfer dari pemerintah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman dalam

rangka pembiayaan pembangunan daerah, dan juga penerimaan dalam bentuk hibah baikyang berasal dari pemerintah maupun pihak lain.

Gambar 1 : Grafik rata-rata Penerimaan Ekonomi kab/kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013

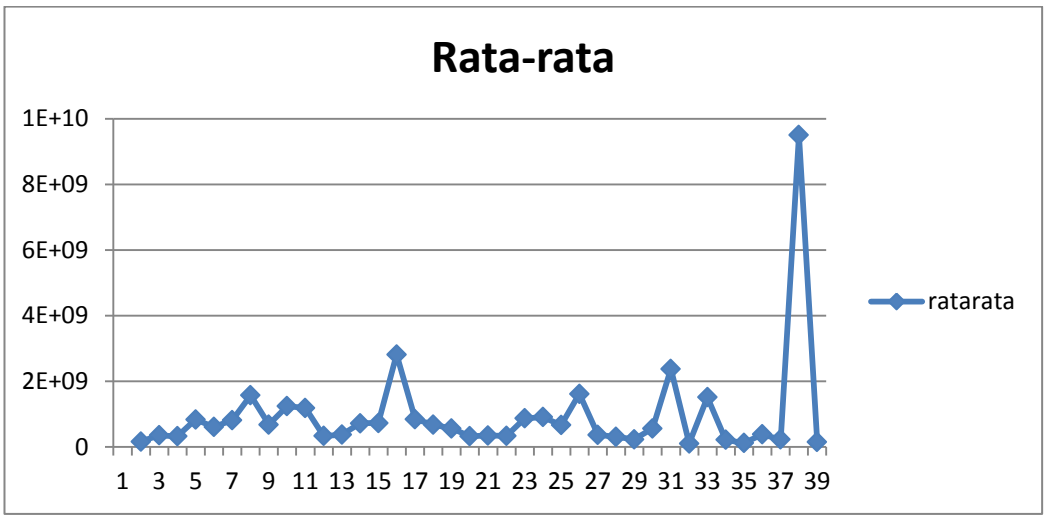

Sumber : BPS data diolah

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa setiap kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki pola pertumbuhan ekonomi yang naik turun. Hal ini membuktikan bahwa masih terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur.

Desentralisasi penerimaan di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur memiliki nilai rata-rata sebesar 0,14. Sedangkan untuk desentralisasi pengeluaran memiliki nilai rata-rata sebesar 0,12. Untuk Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggi (>20%) antara lain Kota Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Malang. Sedangkan untuk desentralisasi pengeluaran tertinggi (>20%) antara lain Kabupaten Malang, Jember, Banyuwangi, Mojokerto, dan Kota Batu.

Tabel 2 : Perkembangan Desentralisasi Penerimaan Fiskal 38 Kab/kota di JawaTimur

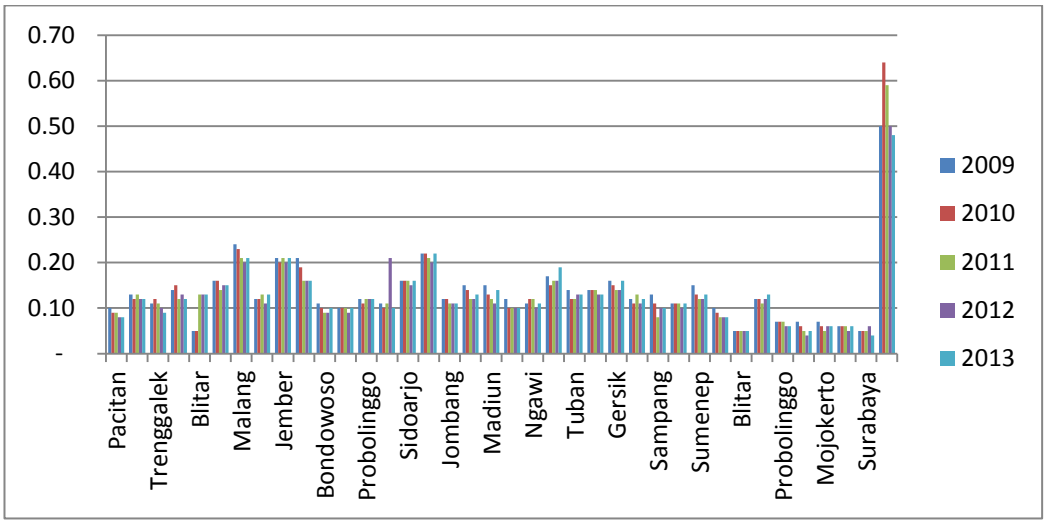

Sumber : Penulis data diolah

Tabel 3 : Perkembangan Desentralisasi Pengeluaran Fiskal 38 Kab/kota di Jawa Timur

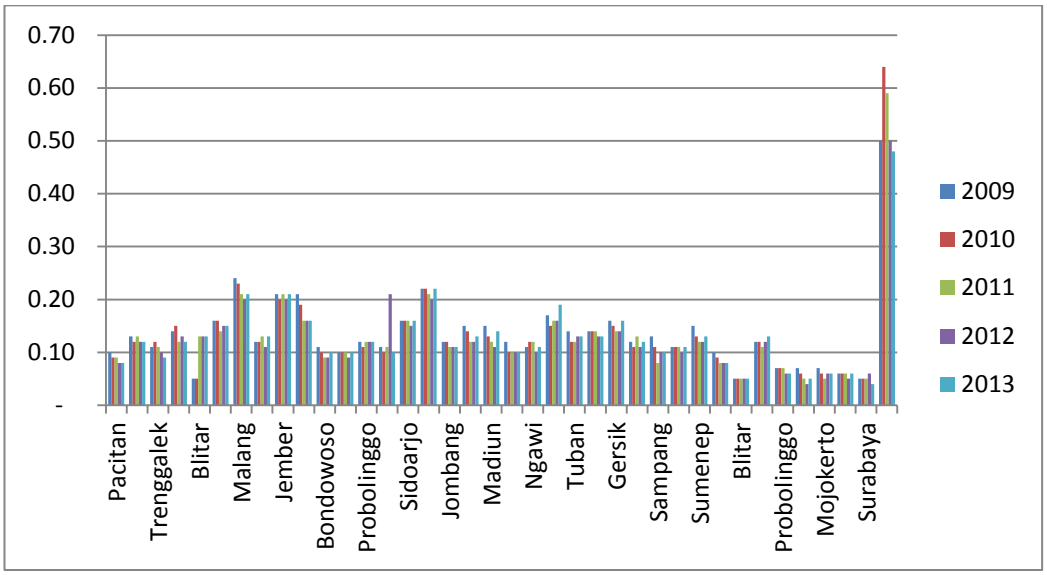

Sumber : Penulis data diolah

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Batu merupakan kota dengan tingkat desentralisasi pengeluaran tertinggi diantara kota-kota lainnya di provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan karena Kota Batu merupakan kota wisata di Provinsi jawa Timur sehingga memiliki nilai besaran belanja daerah yang tinggi untuk terus memperbaiki infrastruktur di wilayahnya.

Demografi

Penduduk adalah aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal, namun mereka juga dapat menjadi beban pembangunan jika pemberdayaan tidak dibarengi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai pada wilayah atau daerah. Jumlah penduduk Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi dari daerah-daerah di propinsi lain menuju kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo.

Tabel 4 : Data Kependudukan Di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Keterangan	2009	2010	2011	2012	Satuan
1. Jumlah Penduduk	38.975.046	40.054.049	40.903.400	42.144.729	Jiwa
a. Laki-Laki	19.401.205	19.761.566	20.338.807	20.955.111	Jiwa
b. Perempuan	19.573.841	20.292.483	20.564.593	21.189.618	Jiwa
2.Usia					
a.0-4 tahun	930.559	956.371	1.989.837	2.452.738	Jiwa
b.15-19 tahun	3.166.209	3.253.884	2.902.780	2.898.298	Jiwa
c.20-59 tahun	23.827.743	24.487.319	23.636.644	25.242.879	Jiwa
d.60 tahun plus	4.495.284	4.619.726	6.181.316	5.115.937	Jiwa

3. Kepadatan Penduduk Rata-rata	839	862	881	907	Jiwa/km
4. Laju pertumbuhan penduduk	1,46	2,77	2,18	3,10	%/Thn

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur Tahun 2015

Rata-rata tingkat penduduk Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 839 jiwa/km dan cenderung meningkat hingga tahun 2012 mencapai 907 jiwa/km. hal ini membuktikan bahwa wilayah Jawa Timur semakin padat penduduk dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk yang terus meningkat ditentukan oleh faktor laju pertumbuhan penduduk, sementara luas wilayah tidak berubah. Provinsi Jawa Timur termasuk merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Namun dengan jumlah yang begitu banyak tersebut tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata.

Tabel 5 : Perkembangan TPAK 38 Kab/kota di Jawa Timur

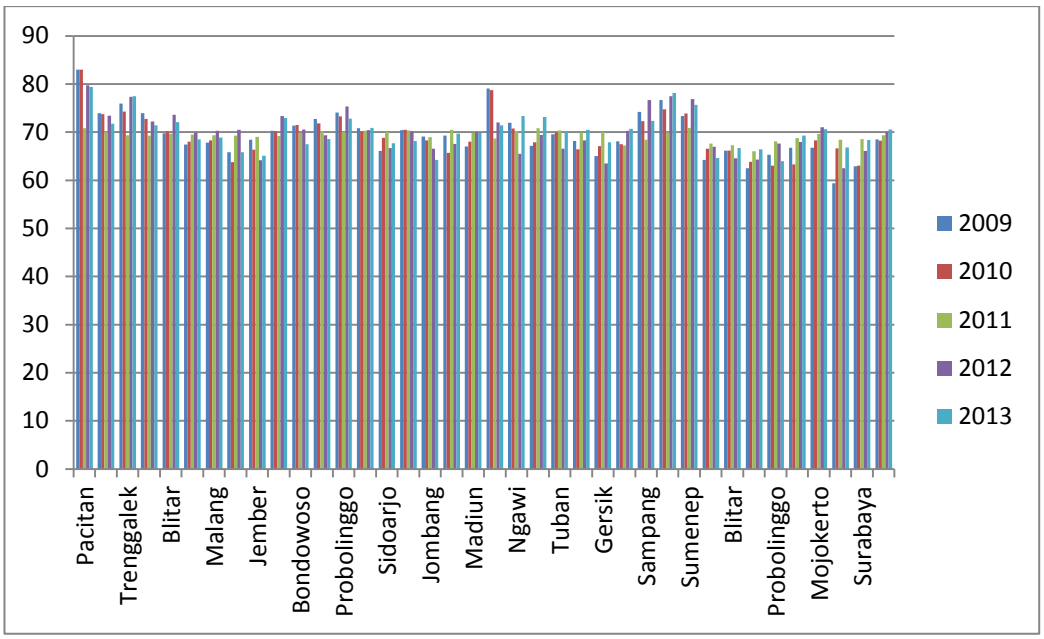

Sumber : Hasil olahan Peneliti

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sudah cukup tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan sudah cukup tinggi. Sebaran tingkat partisipasi angkatan kerja 38 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur digambarkan pada diatas.

Investasi

Dari kurun waktu tahun 2009-2013, nilai investasi di provinsi jawa timur selalu mengalami peningkatan khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Batu, dan Gresik.

Tabel 6 : Perkembangan Investasi 38 Kab/kota di Jawa Timur

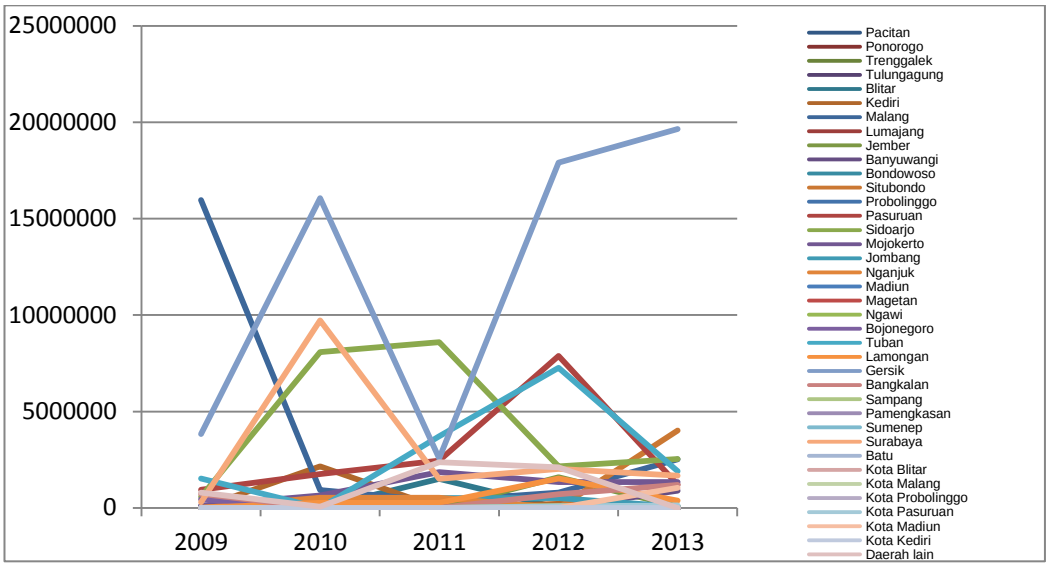

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Dari hasil regresi data panel, terlihat bahwa nilai R square dan adjusted R Square cukup tinggi yang menandakan bahwa korelasi antara variabel independen (Desentralisasi Penerimaan, Desentralisasi Pengeluaran, Investasi dan Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja) dengan Variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) cukup tinggi. Nilai R square sebesar 0.629 (62.9%) menunjukkan nilai yang lebih besar dari α=5%, dan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0.621 yang menunjukkan bahwa 62.1 persen variabel Pertumbuhan Ekonomi akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu desentralisasi penerimaan, desentralisasi pengeluaran, investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan sisanya 38.7 persen variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 7 : Pooled Least Square

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/12/16 Time: 00:21

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 38

Total pool (balanced) observations: 190

Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	1.84E+10	1.16E+09	15.86820	0.0000
X2?	-3.52E+09	9.33E+08	-3.778617	0.0002
X3?	1488.251	527.8306	2.819561	0.0053
X4?	-47481.73	139088.6	-0.341378	0.7332
C	-1.34E+09	2.07E+08	-6.451055	0.0000
R-squared	0.629469	Mean dependent var		9.49E+08
Adjusted R-squared	0.621458	S.D. dependent var		1.55E+09
S.E. of regression	9.51E+08	Akaike info criterion		44.21004
Sum squared resid	1.67E+20	Schwarz criterion		44.29548
Log likelihood	-4194.953	Hannan-Quinn criter.		44.24465
F-statistic	78.57093	Durbin-Watson stat		0.173557
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber :Pengolahan Eviews

Analisis Linier Berganda

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effet* atau*Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : *Common Effect Model* atau pooled OLS

H1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (Widarjono, 2009).

Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt-n-k)}}$$

Dimana:

SSE1 : Sum Square Error dari model *Common Effect*

SSE2 : Sum Square Error dari model *Fixed Effect*

n : Jumlah perusahaan (*cross section*)

nt : Jumlah *cross section* x jumlah *time series*

k : Jumlah variabel independen

Sedangkan F tabel didapat dari:

$$\text{F-tabel} = \{\alpha : df\,(n - 1, nt - n - k)\}$$

Dimana:
α : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa)
n : Jumlah kota/kabupaten (*cross section*)
nt : Jumlah *cross section* x jumlah *time series*
k : Jumlah variabel independen
Untuk menghitung kita lihat hasil *Common Effect* dan *Random Effect* dibawah ini:

Tabel 8 : Common Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/13/16 Time: 14:50

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 38

Total pool (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.04E+09	1.85E+08	-5.593610	0.0000
X1?	1.85E+10	1.17E+09	15.81439	0.0000
X2?	-4.02E+09	9.73E+08	-4.135182	0.0001
X3?	1323.631	562.0759	2.354897	0.0196
X4?	-82296.40	143583.2	-0.573162	0.5672
R-squared	0.624345	Mean dependent var		9.31E+08
Adjusted R-squared	0.616223	S.D. dependent var		1.58E+09
S.E. of regression	9.81E+08	Akaike info criterion		44.27141
Sum squared resid	1.78E+20	Schwarz criterion		44.35685
Log likelihood	-4200.784	Hannan-Quinn criter.		44.30602
F-statistic	76.86833	Durbin-Watson stat		0.177051
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Pengolahan Eviews

Berdasarkan tabel common effect diatas, analisis regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

Y = C + X1 + X2 + X3 + X4

Y = -1,04 + 1,85X1 – 4,02X2 + 1323,631X3 – 82296X4

- Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 1,85 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (desentralisasi penerimaan). Jadi apabila desentralisasi penerimaan mengalami peningkatan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,742 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- Pertumbuhan Ekonomi akan menurun sebesar 4,02 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (desentralisasi pengeluaran). Jadi apabila desentralisasi pengeluaran mengalami peningkatan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,175 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 1323,631 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Investasi). Jadi apabila investasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0,136 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- Pertumbuhan Ekonomi akan menurun sebesar 82296 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Jadi apabila Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan menurun sebesar 0,015 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel penerimaan daerah yanng berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi hal tersebut dikarenakan variabel penerimaan daerah akan menopang pengeluaran daerah. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik jika pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak bersifat konsumtif melainkan lebih pada pengeluaran yang bersifat investasi sehingga penerimaan daerah bisa dimaksimalkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. jika siklus ekonomi di daerah tersebut baik, maka dapat menarik investor dari luar untuk masuk dan berinvestasi di daerah tersebut
2. Desentralisasi Pengeluaran menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena esensi otonomi pengelolaan fiskal di daerah merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini membuat perekonomian daerah akan sangat tergantung pada alokasi dan komposisi belanja daerah.

3. TPAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat disebabkan salah satunya dari pemerintah daerah itu sendiri, dimana pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang diharapkan, hal tersebut menjadikan meningkatnya TPAK, tanpa diimbangi bertambahnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan pengangguran yang secara langsung menurunkan pendapatan perkapita dan berdampak pada menurunnya PDRB.
4. Semakin tinggi nilai investasi yang dikelola suatu wilayah maka perekonomian wilayah tersebut akan meningkat.hal ini dikarenakan investasi dapat merangsang produksi tiap sektor pada daerah tersebut, sehingga dengan peningkatan aktivitas produksi dan peningkatan nilai tambah serta aliran pembayaran pada daerah tersebut dapat menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut meningkat

Saran

1. Diharapkan pada tiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan desentralisasi penerimaannya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya, dan juga dengan menjadikan daerahnya sebagai tempat untuk berinvestasi dan menciptakan iklim investasi yang baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara signifikan. Selain hal tersebut, tiap pemerintah daerah wajib untuk mengkaji desentralisasi pengeluarannya, karena hal tersebut merupakan faktor penentu naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se Jawa Timur 2009-2013.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. Jawa Timur Dalam Angka. http://jatim.bps.go.id/

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI. 2015. LFG Anggaran APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 2009-2013http://www.djpk.kemenkeu.go.id.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. 2015. Data Kependudukan Di Jawa Timur 2009-2013 http://disnakertransduk.jatimprov.go.id.

Ebel, Robert D dan Seidar Yilmas. 2002. " *Concept Of Fiscal Decentralization and Worldwide Overvier"* World Bank Institute.

Gujarati, Damodar N. 2006. "*Ekonometrika Dasar".* Jakarta. Penerbit: Erlangga

Kuncoro, Mudrajad, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Yogyakarta: Erlangga.

Mangkoesoebroto, Guritno 1997. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE

Suparmoko, M. 1994. Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek

Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

Sidik, Machfud, 2000, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan aplikasinya Di Indonesia), Makalah Dalam Seminar Nasional, Yogyakarta.

Sasana. Hadi 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal Tehadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10, No.1, Juni 2009

Siagian. Altito. R. 2010. " Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah". Skripsi Ekonomi Pembangunan. Universitas Diponogoro.

Samuelson, Paul A. dan Nordhaus.2004. Ilmu Makro Ekonomi (edisi terjemahan). Edisi ke-17. Jakarta: Erlangga

Tarigan, Robinson 2004. Ekonomi regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi. Edisi ke Sebelas. Jakarta: Erlangga.